

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025**

I. DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) BIDANG ORGANISASI PENDUKUNG

NO	NORMA	PERMASALAHAN	USULAN SOLUSI
I. PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG			
1. IKAHI			
	1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan	Kemananan Hakim saat pelaksanaan persidangan dan di luar persidangan	Perlu adanya penguatan Regulasi dan Standarisasi terhadap pelaksanaan PERMA no 6 tahun 2020 tentang perubahan atas PERMA no 5 tahun 2020 Dan peraturan KY nomor 8 tahun 2013 oleh Mahkamah Agung bersama KY
	2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan		
	3. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim		
2. IPASPI			
	1. Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun	SDM Khususnya Tenaga Teknis Kepaniteraan belum memiliki Naskah Akademik terkait jenjang jabatannya	Mendorong Mahkamah Agung RI agar pemerintah segera merealisasikan isi naskah akademik

	1989 tentang Peradilan Agama; 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;	yang hanya terbatas sampai dengan Pengadilan Tingkat Banding guna mendukung terwujudnya jenjang karir tenaga fungsional kepaniteraan dan kesekretariatan dari pengadilan Tingkat pertama sampai MA, sesuai dengan UU ASN	yang sudah diusulkan oleh IPASPI Pusat.
3. DYK			
	SK Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/07/SK/II/2002 tentang Dharmayukti Karini	Kurang aktifnya Istri dari Pegawai Pengadilan dengan kegiatan-kegiatan organisasi Dharmayukti Karini	1. Adanya dukungan dari Pimpinan pusat untuk memberikan motivasi kepada Istri dari pegawai untuk lebih aktif dalam keanggotannya di Dharmayukti Karini;
II. PENGADILAN AGAMA METRO			
1	Dharma Yukti Karini mempunyai ruang kantor yang memadai dan representative.	Bahwa sampai saat ini masih ada beberapa cabang Dharma Yukti Karini yang belum mempunyai kantor di Pengadilan Agama masing-masing.	Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama menerbitkan surat edaran yang isinya menghimbau pimpinan Pengadilan

			Agama untuk memfasilitasi ruang kantor Dharma Yukti Karini dengan membayar PNBP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Pasal 4 huruf b anggaran dasar IKAHI hasil munas XX maksud dan tujuan didirikannya IKAHI adalah : a. memelihara dan membina kesatuan dan persatuan serta memperkokoh kesetiakawanan para anggotanya dengan memupuk solidaritas jiwa korp yang merasa memiliki, ikut bertanggung jawab dan berani mawas diri serta menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi anggota.	Belum pernah ada forum atau kegiatan Bersama yang melibatkan seluruh anggota IKAHI yang bertugas di wilayah hukum PTA Bandar Lampung.	Agar pengurus daerah IKAHI (PTA Bandar Lampung) merencanakan untuk adanya kegiatan silaturahmi yang bernuansa refresing setidaknya 1 kali setiap tahun.
3	Semestinya organisasi IPASPI Cabang PTA Bandar Lampung melaksanakan kegiatan Bersama.	Bahwa beberapa tahun terakhir ini belum ada kegiatan yang melibatkan seluruh anggota IPASPI yang bertugas di wilayah PTA Bandar Lampung.	Agar pengurus IPASPI PTA Bandar Lampung merencanakan untuk adanya kegiatan silaturahmi 1 kali dalam setahun.
III. PENGADILAN AGAMA KALIANDA			

1		SK PTWP selama ini diterbitkan oleh Ketua	SK PTWP diterbitkan oleh PTWP Cabang
2		Selama ini dharmayukti kurang bersinergi secara administrasi dengan pimpinan satker terkait kegiatan yang berhubungan dengan anggota yang berstatus pns	Perkuat sinergitas antara dharmayukti dan pimpinan satker
3		Pertemuan-pertemuan dharmayukti daerah dilaksanakan dalam waktu yang terlalu sering yaitu 3 bulan sekali	Bisa lebih diefektif dan efisien
		Kerja sama antar koprasi seluruh satker belum ada, sehingga jika ada yang mutasi dan promosi, masih belum otomatis penyelesaian administrasi nya	Dibuat kerjasama koprasi antar satker seluruh pta bandar lampung, agar jika ada mutasi pegawai, penyelesaian administrasi nya bisa otomatis
IV. PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG			
1	IKAHI	Nihil	-
2	IPASPI	Nihil	-
3	Dharma Yuktikarini	Kurangnya berpartisipasi ibu-ibu Darmayuktikarini dalam kegiatan yang selalu diadakan	-
4	PTWP	Masih kurangnya minat anggota Satker untuk ikut serta dalam latihan Tennis	Diaktifkan lagi dengan menjadwalkan hari dan waktu Latihan
V. PENGADILAN AGAMA MESUJI			

1	-	Kurangnya Peran Aktif IPASPI dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota	Membuat Program Peningkatan Kesejahteraan Anggota
2	-	Kurangnya program pembinaan bagi atlet PTWP Kurangnya sosialisasi program kerja PTWP daerah oleh pembina dan pengurus cabang PTWP	Membuat program pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi para atlet PTWP Daerah PERLU DORONGAN dan motivasi oleh pembina dan pengurus cabang terhadap anggota untuk mengikuti latihan tenis secara rutin
VI. PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU			
2	Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Panitera dan Sekretaris Indonesia;	Secara organisasi IPASPI sudah ada diseluruh Pengadilan sewilayah PTA Bandar Lampung, namun terkesan kurang koordinasi baik di tingkat pertama ataupun tingkat banding	Untuk dijadwalkan koordinasi secara berkala IPASPI sewilayah PTA Bandarlampung
PTA BANDAR LAMPUNG			
1	AD/ART IPASPI	Pasal	Segera dibentuk pengurus resmi IPASPI baik di daerah maupun di Tingkat Banding
	PASAL 12 AD, Pasal 6 ART PTWP	belum lengkapnya susunan pengurus ptwp cabang sewilayah pta bandar lampung	Perlu segera menyusun struktur kepengurusan PTWP Caban sewilayah pta bandar lampung dan diteruskan ke ptwp daerah untuk disahkan

	Pasal 16 AD	Kurang aktifnya pimpinan cabang ptwp dalam menyetorkan iuran anggota kepada ptwp daerah pta bansdar lampung	Dijharapkan kepada seluruh pengurus ptwp cabang sewilayah pta bdl untuk menyetorkan iuraananggota setiap awal bulan ke rekening ptwp daerah pta bdl dan kepada ptwp daerah diaharapkan unrtuk melaporakan kondisi keuangan ptwp daerah setiap bulannuya. Paling lambat tanggal 6
kop		terdapat anggota koperasi yang masih tersendat dalam pembayaran angsuran pinajaman	